



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI RIAU

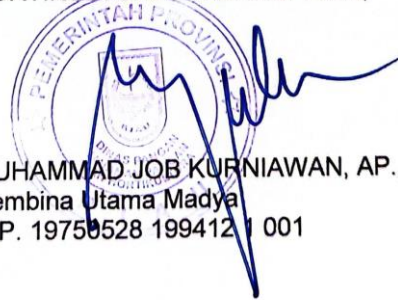
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas PTPH Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas PTPH Provinsi Riau Tahun 2024 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Plt. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,



MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG	5
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	9
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
1.5. PERMASALAHAN UTAMA	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.2. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.1.1 Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan.....	17
3.1.2 Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura.....	23
3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator	31
3.1.4 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja	29
3.2. REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV PENUTUP.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77

4.2	Langkah Strategis	77
-----	-------------------------	----

Lampiran	
----------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas PTPH Riau.....	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan	17
Tabel 3.3 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan 2024	18
Tabel 3.4 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan dengan Target Tahun Akhir Renstra	18
Tabel 3.5 Capaian IKP Se-Indonesia	19
Tabel 3.6 Capaian Indikator Produksi Tanaman Pangan Hortikultura.....	23
Tabel 3.7 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2023 dan 2024	24
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dengan Target Akhir Tahun Renstra	25
Tabel 3.9 Efisiensi Penyerapan Anggaran	28
Tabel 3.10 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja	29
Tabel 3.11 Realisasi Kinerja dan Anggaran	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang mendorong setiap instansi pemerintah dalam bertanggung jawab akan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program serta kegiatan. Akuntabilitas kinerja yang baik dan terpercaya (*good governance*) juga menjadi suatu prasyarat dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP mempunyai peran penting dalam menjadi alat kendali dalam memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian visi misi pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap perangkat daerah (PD) atas penggunaan seluruh sumber dayanya; meliputi sumber daya manusia (*Human Resources*), sarana prasarana, serta anggaran (*Fund*) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berlangsung.

Pada Tahun 2024, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.694.175.091,00 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau. Hal tersebut di atas merupakan target capaian yang tertuang pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2019-2024, serta Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2024.

Atas penjabaran tugas dan fungsi tersebut, serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mewujudkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka DPTPH Provinsi Riau berkewajiban dalam pelaksanaannya untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini juga memuat ikhtisar pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Laporan Kinerja ini juga akan menjelaskan capaian kinerja tahun berjalan, perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahun yang tertuang pada dokumen Renstra, serta analisis penyebab keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian kinerja baik pada skala program maupun kegiatan pada tahun berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 meliputi 4 segmen naratif; BAB I PENDAHULUAN memuat penjabaran latar belakang dan aspek strategis yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), BAB II PERENCANAAN KINERJA mengurai penjelasan terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah serta pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, BAB III AKUNTABILITAS KINERJA memuat pengukuran dan formulasi terkait capaian kinerja serta analisis-analisis yang diperlukan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja perangkat daerah, dan BAB IV PENUTUP sebagai konklusi dari pengukuran yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdapat Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dalam Pergub No.42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyebutkan bahwa unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Perangkat Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Bidang Ketahanan Pangan
- c. Bidang Tanaman Pangan
- d. Bidang Hortikultura
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang terdiri dari :

- a. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
 - 3) Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pelatihan;
 - 3) Seksi Penyuluhan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Produksi Benih;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 3) Seksi Pengujian pupuk, pestisida dan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kesekretariatan

- Pelaksanaan kegiatan terkait pemeliharaan Gedung kantor
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan administrasi terkait surat menyurat dan kepegawaian

2. Bidang Ketahanan Pangan

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan pendukung ketahanan pangan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

3. Bidang Tanaman Pangan

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

4. Bidang Hortikultura

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,

- pelaksanaan kegiatan pendukung peningkatan produktivitas hortikultura
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan,
- pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

6. Unit Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan
- Koordinasi dan fasilitasi
- Pembinaan teknis kegiatan, pembinaan dan penumbuhan penangkar benih, serta pengembangan teknologi perbanyakan benih
- Pemeliharaan benih sumber, koleksi dan plasma nutfah
- Pemberian pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura
- Pengawasan terhadap mutu benih tanaman dan hortikultura yang beredar, pengecekan mutu benih dan memonitor data stok dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan

5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A).

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan
- Koordinasi dan fasilitasi
- Pelayanan masyarakat terkait proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan

6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian (Kelas A)

- Penyusunan dan perumusan kegiatan perencanaan
- Koordinasi dan fasilitasi
- Penyediaan bantuan di bidang pelatihan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)
- Pengelolaan system informasi manajemen pengembangan SDM Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- Pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- Pemantauan dan evaluasi

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang dan UPT dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisnya.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas PTPH Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pangan dan pertanian. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas PTPH Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yakni :

- 1) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Standar konsumsi energi yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan dan Gizi (WKPG) yakni 2.000 Kkalori/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein 52 gram/kapita/hari. Sementara kemampuan

produksi beras terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat tidak berbanding lurus bahkan cenderung semakin menurun. Pemanfaatan potensi pangan local seperti kelompok umbi-umbian dan pati sebagai diversifikasi pangan diharapkan dapat mengurangi angka konsumsi pangan pokok beras di Provinsi Riau.

- 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap mutu dan keamanan pangan segar belum optimal, terutama untuk kelompok buah dan sayur Provinsi Riau masih rendah. Pengawasan dan pengujian diarahkan pada uji residu pestisida, masih sedikit yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan penerapan GAP dan GHP yang baik oleh petani dan pelaku diharapkan dapat memenuhi standar persyaratan keamanan pangan segar yang ditetapkan.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan daerah. Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (4) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan dimana luas baku lahan sawah provinsi Riau adalah 62.689 ha (sesuai SK Menteri ATR No. 686 tahun 2019), sementara itu yang dimanfaatkan untuk IP 200 baru lebih kurang 14.000 ha. Masih rendahnya penerapan mekanisasi ditingkat lapang juga menyebabkan rendahnya kemampuan untuk meningkatkan IP 100 menjadi IP 200. Selain dari pada itu berdasarkan Roadmap Riau Bertani yang telah disusun, pemanfaatan lahan dapat dimaksimalkan menjadi IP 200 dengan adanya dukungan prasarana (infrastruktur dan mekanisasi) yang baik dan memadai sesuai kebutuhan.
- (5) Rendahnya produktivitas sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dimana produktivitas padi berkisar 3,64 – 4,31 ton per hektar pada periode 2019-2022, sedangkan potensi produktivitas dapat dioptimalkan menjadi 7-12 ton per hektar. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,

dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang.

- (6) Pengawalan dan pembinaan terhadap panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura, terutama terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam lainnya yang belum optimal. Upaya yang diperlukan dalam pengawalan adalah dengan pembinaan melalui peningkatan pengetahuan sumber daya petani serta melakukan gerakan pengendalian apabila terjadi serangan yang bersifat insidental.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas PTPH Riau

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya Sistem Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	64,12	65,87	67,62	69,37	71,12
			Skor PPH Ketersediaan (skor)	86,03	87,03	89,80	92,50	96,00
			Persentase Keamanan Pangan Segar	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Persentase wilayah rentan pangan	28,40	26,62	25,44	23,07	21,30
2.	Meningkatkan pendapatan petani TPH	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura (TPH)	NTUP Pangan	95,81	101,50	101,60	101,70	101,80
			NTUP Hortikultura	98,06	103,50	103,60	103,70	103,80
			Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	243.689	255.630	313.213	373.404	436.203
			Jumlah Produksi Jagung (Ton)	35.850	36.934	38.049	39.199	40.382
			Jumlah Produksi Buah Unggulan daerah (Durian) / (Ton)	-	17.154	19.257	21.477	23.814
			Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) / (Ton)	-	17.796	19.236	20.775	22.419

Sumber: Perubahan Renstra 2019 - 2024 Dinas PTPH Provinsi Riau

2.1.1. Definisi Indikator

1. Indikator Satu : Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Empat komponen ketahanan pangan adalah ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.

2. Indikator dua : Skor PPH Ketersediaan

Skor PPH Ketersediaan adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

Formulasi perhitungan jalan mantap adalah sebagai berikut :

Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman ketersediaan kelompok pangan (% AKE x bobot masing-masing kelompok pangan)

3. Indikator Tiga : Persentase keamanan pangan segar

Pangan segar merupakan pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Formulasi perhitungan persentase keamanan pangan segar adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{jumlah pangan segar (buah dan sayur) yang bebas residu pestisida}}{\sum \text{jumlah sampel pangan segar yang diuji pestisida}} \times 100\%$$

4. Indikator Empat : Persentase wilayah rentan pangan

Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan daerah hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Keberhasilan indikator ini diukur dari penurunan wilayah rentan pangan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{jumlah desa rawan pangan}}{\sum \text{jumlah desa se-Provinsi}} \times 100\%$$

5. Indikator Lima : NTUP Pangan

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi. NTUP Pangan adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi tanaman pangan. Data ini merupakan data yang bersumber dari BPS Provinsi Riau.

6. Indikator Enam : NTUP Hortikultura

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi. NTUP Pangan adalah rasio antara harga yang diterima petani dari hasil pertanian dengan harga yang dibayarkan petani untuk biaya produksi hortikultura. Data ini merupakan data yang bersumber dari BPS Provinsi Riau

7. Indikator Tujuh : Jumlah Produksi Padi

Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

= Luas Panen x Produktivitas

- Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman padi dan berhasil dipanen.
- Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

(Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

8. Indikator Delapan : Jumlah Produksi Jagung

Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

= Luas Panen x Produktivitas

- Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman jagung dan berhasil dipanen.
- Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

(Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

9. Indikator Sembilan : Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian)

Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

= Luas Panen x Produktivitas

- Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman buah-buahan dan berhasil dipanen.
- Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

(Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

10. Indikator Sepuluh : Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)

Indikator ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

= Luas Panen x Produktivitas

- Luas Panen adalah luas lahan yang ditanami tanaman sayuran dan berhasil dipanen.
- Produktivitas adalah hasil panen rata-rata per unit luas lahan, biasanya dihitung dalam ton atau kilogram per hektar.

(Data Statistik Pertanian (SP) Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

2.2. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024

Pada Tahun 2024 dilakukan perbaikan pohon kinerja sesuai arahan Menpan. Perbaikan tersebut menyebabkan beberapa indikator kinerja utama pada Renstra 2019 - 2024

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12
2	Meningkatnya produksi TPH	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382
		Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)	23.814
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)	22.419
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (skor)	72,95

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Jumlah sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya ada 3 (tiga), dengan uraian sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan. Indikator Indeks Ketahanan Pangan diambil dari data yang diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12	70,42	100,43

Perbandingan Capaian tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12	70,42	100,43	68,62	68,68	100,09

Berdasarkan tabel di atas, capaian pada tahun 2023 dan 2024 keduanya di atas 100% atau melebihi target per tahunnya.

Untuk perbandingan dengan target tahun akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan dengan Target Tahun Akhir Renstra

Sasaran	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi 2024
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,12	70,42

Realisasi IKP Tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra.

Untuk capaian IKP Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian IKP Se-Indonesia

NO	PROVINSI	Kode Provinsi	IKP	Kelompok IKP	Kerentanan Area
1	BALI	51	88,23	6	Sangat Tahan
2	JAWA TENGAH	33	85,34	6	Sangat Tahan
3	DKI JAKARTA	31	85,13	6	Sangat Tahan
4	SUMATERA BARAT	13	84,32	6	Sangat Tahan
5	DI YOGYAKARTA	34	84,15	6	Sangat Tahan
6	JAWA TIMUR	35	83,86	6	Sangat Tahan
7	SULAWESI SELATAN	73	83,82	6	Sangat Tahan
8	JAWA BARAT	32	82,97	6	Sangat Tahan
9	KALIMANTAN SELATAN	63	82,95	6	Sangat Tahan
10	LAMPUNG	18	82,58	6	Sangat Tahan
11	GORONTALO	75	81,47	6	Sangat Tahan
12	BANTEN	36	79,25	6	Sangat Tahan
13	KALIMANTAN TIMUR	64	78,61	6	Sangat Tahan
14	NUSA TENGGARA BARAT	52	78,44	6	Sangat Tahan
15	SUMATERA UTARA	12	77,49	6	Sangat Tahan
16	SULAWESI TENGAH	72	76,87	6	Sangat Tahan
17	SULAWESI TENGGARA	74	76,68	6	Sangat Tahan
18	SULAWESI UTARA	71	76,32	6	Sangat Tahan
19	KALIMANTAN UTARA	65	75,77	6	Sangat Tahan
20	JAMBI	15	74,94	6	Sangat Tahan
21	SUMATERA SELATAN	16	74,07	5	Tahan
22	KALIMANTAN BARAT	61	73,49	5	Tahan
23	BENGKULU	17	73,39	5	Tahan
24	SULAWESI BARAT	76	71,99	5	Tahan
25	NUSA TENGGARA TIMUR	53	70,91	5	Tahan
26	RIAU	14	70,42	5	Tahan
27	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	19	70,21	5	Tahan
28	KALIMANTAN TENGAH	62	70,16	5	Tahan
29	KEPULAUAN RIAU	21	66,29	5	Tahan
30	MALUKU	81	62,68	4	Agak Tahan
31	MALUKU UTARA	82	61,44	4	Agak Tahan
32	PAPUA BARAT	91	51,36	3	Agak Rentan
33	PAPUA	94	40,21	2	Rentan

Sumber Data : Bapanas 2024

Dari tabel di atas Riau menempati peringkat 26 dengan status kerentanan area Tahan.

Hambatan dan Kendala pencapaian target dan peningkatan capaian kinerja ini dapat tercapai karena hal-hal berikut :

- 1.Keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi lahan.
- 2.Faktor cuaca dan perubahan iklim yang berdampak pada hasil panen.
- 3.Kurangnya akses pasar bagi petani kecil.
- 4.Kendala teknologi: Minimnya adopsi teknologi modern di kalangan petani tradisional.
5. Harga input pertanian yang meningkat, seperti pupuk dan benih.

Penyebab Keberhasilan :

1. Nilai aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan mengalami kenaikan.
2. Ketersediaan bahan pokok pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan wilayah Provinsi Riau, dapat diperoleh dari beberapa faktor yakni stok atau cadangan pangan, produksi dalam Provinsi Riau dan produksi dari luar provinsi. Untuk pemenuhan yang berasal dari dalam provinsi, produksi beras baru memenuhi kebutuhan sebesar 27,4% dari kebutuhan penduduk Provinsi Riau, sedangkan untuk kekurangannya diperoleh dari luar provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Selatan).
3. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan adalah produksi, stok atau cadangan pangan, impor dan ekspor bahan pangan. Masih terdapat 13 kecamatan yang termasuk kategori wilayah rentan pangan yang harus di perhatikan lebih lanjut dalam penanganannya.
4. Tingkat kesadaran petani dan pelaku usaha dalam menerapkan GAP (*Good Agricultural Practices*) dan GHP (*Good Handling Practices*) semakin meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan :

Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui :

1. Modernisasi Sarana Dan Prasarana Pertanian
2. Penyediaan alat dan mesin pertanian berupa alsintan pra panen dan pasca panen dan Pengembangan sumber-sumber air, baik air permukaan maupun air tanah (dangkal/ dalam) serta pengembangan sistem jaringan irigasi yang terintegrasi kewenangan PU dan Pertanian dalam upaya pembenahan dan perluasan sistem produksi sehingga dapat menjamin kebutuhan air untuk pertanaman dan Perluasan Areal Tanam (PAT) pada sawah irigasi, tadah hujan dan rawa.
3. Peningkatan SDM Dan Kelembagaan Pertanian Unggul
4. Peningkatan kapasitas SDM, regenerasi petani, transformasi kelembagaan berbasis korporasi petani dan digitalisasi pertanian dalam upaya penguatan sistem produksi dan penguatan daya saing, hilirisasi dengan pemantapan pasar dan penguasaan pasar
5. Pertanian Berkelanjutan
6. Percepatan penetapan LP2B dan pencadangan lahan, penerapan standar instrumen pertanian pada proses budidaya dan produk hasil pertanian serta penerapan inovasi teknologi pertanian dan ramah lingkungan.
7. Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)
8. Peningkatan IP dari rata-rata IP-129 menjadi IP-200 pada lahan sawah yang sumber airnya cukup untuk pertanaman IP melalui pengaturan pola tanam, penggunaan varietas padi genjah dan untuk lahan sawah yang kering dengan varietas tahan kekeringan/ padi gogo.
9. Peningkatan Produktivitas (PP)
10. Peningkatan produktivitas dari capaian tertinggi 4,18 ton/ha menyusul rata-rata nasional 5,29 ton/ha dengan penggunaan benih unggul spesifik lokasi dan penggunaan pupuk berimbang yang ramah lingkungan melalui bantuan benih dan pupuk serta penerapan teknologi budidaya

Peningkatan Keterjangkauan Pangan melalui :

1. Penguatan Distribusi pangan (optimalisasi gudang penyimpanan di wilayah strategis untuk mencegah kekosongan stok),
2. Stabilitas Pasokan dan Harga (Intervensi pasar melalui operasi pasar murah), Peningkatan Sistem Logistik,
3. Manajemen stok yang efisien,
4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Akses Pasar (Pengembangan pasar lokal)
5. Peningkatan Informasi harga pangan berbasis aplikasi dan Tata Niaga Pangan Contract Farming (kerja sama antara petani dan pelaku usaha) dan BUMD Pangan (stabilisator harga dan pasokan pangan di daerah).

Peningkatan Pemanfaatan Pangan melalui :

Perbaikan Pola Konsumsi, Penganekaragaman Konsumsi, Perbaikan Gizi, Keamanan dan Mutu Pangan

Solusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi ketersediaan pangan pokok adalah dengan :

1. Meningkatkan penyediaan dalam daerah melalui peningkatan produksi padi, mendorong masyarakat melakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras serta melakukan kerjasama dengan Provinsi tetangga penghasil beras.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasi perbaikan infrastruktur agar pendistribusian dapat berjalan dengan baik.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha serta mensosialisasikan pentingnya penerapan GAP dan GHP untuk kesehatan masyarakat
4. Pengendalian alih fungsi lahan: Melalui regulasi yang lebih ketat dan insentif untuk mempertahankan lahan produktif.

5. Pengembangan teknologi adaptif: Seperti varietas unggul tahan iklim dan sistem pertanian berbasis digital.
6. Penguatan akses pasar: Melalui promosi produk lokal dan kemitraan dengan sektor ritel modern.
7. Subsidi input pertanian: Menurunkan biaya produksi dengan subsidi pupuk dan alat mesin pertanian.
8. Kolaborasi lintas sektor: Melibatkan perguruan tinggi dan institusi riset untuk inovasi teknologi pertanian.

3.1.2 Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2024 terdiri dari 4 Indikator, sesuai tabel berikut :

Tabel 3.6 Capaian Indikator Produksi Tanaman Pangan Hortikultura

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203	225.837	51,77
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382	9.369,14	23,20
	Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814	25.663,16	107,76
	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419	15.332,35	68,38

Perbandingan Capaian tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203	225.837	51,77	373.404	210.373,61	56,34
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382	9.369,14	23,20	39.199	9.975	24,45
	Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814	25.663,16	107,76	21.477	27.289	127,06
	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419	15.332,35	68,38	20.775	19.207	92,45

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

1. produksi padi mengalami penurunan sebesar 4,57%.

2. Produksi jagung mengalami penurunan sebesar 1,25%
3. Produksi Durian mengalami penurunan sebesar 19,3%
4. Produksi Cabe mengalami penurunan sebesar 24,07%

Untuk perbandingan dengan target tahun akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dengan Target Akhir Tahun Renstra

Sasaran	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi 2024
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203	225.837
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382	9.369,14
	Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814	25.663,16
	Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419	15.332,35

Realisasi Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Tahun 2024 rata-rata tidak mencapai target kecuali produksi durian.

Penyebab kegagalan dan keberhasilan pencapaian target dan peningkatan capaian kinerja ini dapat tercapai karena hal-hal berikut :

1. Kinerja Produksi Padi

- Terbatasnya infrastruktur dalam mendukung peningkatan intensitas pemanfaatan lahan seperti jaringan irigasi yang tidak fungsional, tanggul yang tidak berfungsi dan lainnya yang juga merupakan faktor penghambat dalam pencapaian target luas tanam/panen.
- Alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra tanam dan pasca panen yang belum memadai untuk melakukan percepatan tanam serta untuk meminimalisir kehilangan hasil.
- Rendahnya capaian produksi juga disebabkan pada tahun 2024 terjadi puso akibat anomali iklim,
- Selain dari pada itu, rendahnya produksi juga disebabkan karena ada 4.066,8 ha padi ladang yang tidak terakomodir dalam perhitungan luas panen dengan metode KSA.
- Pola pertanian yang subsisten yang orientasinya masih untuk memenuhi kebutuhan keluarga

2. Kinerja Produksi Jagung

Komoditi jagung bukanlah komoditi utama di Provinsi Riau dan komoditi ini belum mempunyai lahan baku. Penanamannya sering dilakukan disela-sela tanaman lainnya. Dalam pengembangan komoditi jagung, petani masih berorientasi pada program, dimana sangat tergantung pada ada tidaknya bantuan dari Pemerintah.

3. Kinerja Produksi Durian

Komoditi durian termasuk komoditi unggulan daerah untuk Provinsi Riau. Animo petani untuk mengembangkan tanaman durian cukup besar.

4. Kinerja Produksi Cabe

Capaian produksi yang cukup tinggi ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produktivitas tanaman cabe. Dengan penerapan teknologi budidaya tanaman cabe serta penggunaan sarana produksi (bibit/benih bermutu, pupuk yang sesuai kebutuhan dan lain lainnya) dapat memicu peningkatan produktivitas. Komoditi tanaman cabe juga termasuk tanaman yg cukup diminati oleh petani, karena harga yang cukup bersaing di pasaran

Upaya dan Solusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan tanaman pangan hortikultura adalah :

1. Peningkatan produksi padi

- Menyediakan/memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dan sarana produksi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan melalui program pemerintah.
- Melakukan pengawalan terhadap luas panen guna meminimalisir kehilangan hasil akibat serangan OPT dan bencana alam lainnya.
- Memperkuat kelembagaan penyuluh dan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, agar mau dan mampu meningkatkan produksi padi melalui peningkatan IP dan produktivitas.

2. Peningkatan produksi jagung

- Menyediakan/memfasilitasi kebutuhan infrastruktur dan sarana produksi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan melalui program pemerintah.
- Memperkuat kelembagaan penyuluh dan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, agar mau dan mampu meningkatkan produksi padi melalui peningkatan IP dan produktivitas.

3. Peningkatan produksi durian

Diperlukan adanya kegiatan yang mendukung pengembangan komoditi durian dalam rangka peremajaan tanaman tua dan rusak.

4. Peningkatan produksi cabe

Perlu adanya bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang mendukung pengembangan komoditi untuk percepatan tanam serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap penggunaan teknologi budidaya tanaman cabe.

3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja sasaran dan indikator

Dalam melakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, pengukurannya dilakukan dengan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan, dalam hal ini adalah dana atau anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Efisiensi Penyerapan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	%PENYERAPAN ANGGARAN	%TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Sistem Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,42	30,81	69,19
2	Meningkatnya produksi TPH	Jumlah Produksi (Ton GKG)	436.203	78,67	21,33
		Jumlah Produksi Jagung (Ton PK)	40.382		
		Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)	23.814		
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)	22.419		

3.1.4 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	70,12	70,42	100,43	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	778.261.191,00	397.730.721,00	51,11
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	623.292.084,00	297.203.765,00	47,68

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	468.269.665,00	186.266.765,00	39,78
						Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	155.022.419,00	110.937.000,00	71,56
						Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	154.969.107,00	100.526.956,00	64,87

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			
						Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	129.969.317,00	79.969.317,00	61,53
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	24.999.790,00	20.557.639,00	82,23
						PROGRAM			

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	645.549.655,00	40.884.000,00	6,33
						Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	64.999.655,00	38.834.000,00	59,74
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	64.999.655,00	38.834.000,00	59,74
						Penanganan			

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	580.550.000,00	2.050.000,00	0,35
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	580.550.000,00	2.050.000,00	0,35
2	Meningkatnya produksi tanaman	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436.203,00	225.837,00	51,77	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	43.450.918.036,00	34.381.911.774,90	79,13

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
	pangan hortikultura					PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40.382,00	9.369,14	23,20	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	34.341.333.031,00	27.759.281.878,90	80,83
		Jumlah Produksi Buah-Buahan (Durian) (Ton)	23.814,00	25.663,16	107,76	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	34.341.333.031,00	27.759.281.878,90	80,83
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe)((Ton)	22.419,00	15.332,35	68,38	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	9.109.585.005,00	6.622.629.896,00	72,70

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	9.109.585.005,00	6.622.629.896,00	72,70
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.107.205.140,00	5.421.365.404,77	66,87
						Penataan Prasarana Pertanian	8.107.205.140,00	5.421.365.404,77	66,87
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	2.932.031.805,00	1.357.356.535,43	46,29

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Pengelolaan Jalan Usaha Tani			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	5.175.173.335,00	4.064.008.869,34	78,53
						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	-	-
						UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN	512.573.222,00	430.611.162,00	84,01

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						PANGAN			
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	389.978.734,00	320.148.819,00	82,09
						Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	389.978.734,00	320.148.819,00	82,09
						Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	314.979.406,00	253.346.311,00	80,43
						Rekomendasi			

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	74.999.328,00	66.802.508,00	89,07
						UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	2.040.454.938,00	1.653.752.966,00	81,05
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.611.992.141,00	1.255.493.750,00	77,88
						Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	461.997.212,00	317.583.750,00	68,74
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	461.997.212,00	317.583.750,00	68,74

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	999.999.929,00	828.446.300,00	82,84
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	999.999.929,00	828.446.300,00	82,84
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	149.995.000,00	109.463.700,00	72,98
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	149.995.000,00	109.463.700,00	72,98

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	7.242.655.110,00	6.603.853.752,00	91,18
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.199.979.887,00	933.614.850,00	77,80
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.159.979.947,00	902.339.850,00	77,79
						Pengelolaan			

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Penerbitan Sertifikat Benih	232.441.966,00	226.777.000,00	97,56
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	927.537.981,00	675.562.850,00	72,83
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	39.999.940,00	31.275.000,00	78,19
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu	39.999.940,00	31.275.000,00	78,19

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme			
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.410.952.000,00	4.113.494.253,00	93,26
						Penataan Prasarana Pertanian	4.410.952.000,00	4.113.494.253,00	93,26
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana	4.410.952.000,00	4.113.494.253,00	93,26

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Pendukungnya			
						UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.361.336.688,00	1.286.795.928,00	94,52
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	927.851.569,00	856.411.986,00	92,30
						Pengendalian dan Penanggulangan	927.851.569,00	856.411.986,00	92,30

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15
						Bencana Pertanian Provinsi			
						Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	927.851.569,00	856.411.986,00	92,30

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa :

Sasaran strategis 1, Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Peningkatan sistem ketahanan pangan adalah 2 Program. Dari 2 Program tersebut terdapat 1 Program yang serapan anggarannya termasuk rendah yakni Program Penanganan Kerawanan Pangan yakni 6,33%. Namun tidak mengurangi kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis karena capaiannya fisik 100%.

Sasaran strategis 2, Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Terdapat 6 Program yang mendukung sasaran ini dan realisasinya rata-rata berpredikat baik.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya ketahanan pangan					121.694.175.091,00				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	95,00	Poin	778.261.191,00	88,14	397.730.721,00	92,78	51,11
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2	Laporan	623.292.084,00	2	297.203.765,00	100,00	47,68

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
		Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Provinsi	Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Provinsi	1	Laporan	155.022.419,00	1	110.937.000,00	100,00	71,56
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Laporan	468.269.665,00	1	186.266.765,00	100,00	39,78
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan	Jumlah Dokumen Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per	6	Dokumen	154.969.107,00	6	100.526.956,00	100,00	64,87

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Kapita Per Tahun							
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	Dokumen	129.969.317,00	5	79.969.317,00	100,00	61,53
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	24.999.790,00	1	20.557.639,00	100,00	82,23
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Wilayah Rawan Pangan	36	Kec	645.549.655,00	9	40.884.000,00	25,00	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan FSVA (Food Security Vulnerabilty Atlas)	1	Laporan	64.999.655,00	1,00	38.834.000,00	100,00	59,74
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	64.999.655,00	1	38.834.000,00	100,00	59,74
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah	44,50	Ton	580.550.000,00	44,50	2.050.000,00	100,00	0,35

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Dokumen	580.550.000,00	1	2.050.000,00	100,00	0,35
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar	85	Persen	389.978.734,00	93,00	320.148.819,00	109,41	82,09

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan	61	Dokumen	389.978.734,00	118	320.148.819,00	193,44	82,09
		Sertifikasi Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50	Sertifikat	314.979.406,00	93	253.346.311,00	186,00	80,43
		Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5	Dokumen	74.999.328,00	6	66.802.508,00	120,00	89,07

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100	Persen	60.171.486.738,00	100	56.813.221.044	100,00	94,42
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	94.999.808,00	5	70.837.098,00	100,00	74,57

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	5	Dokumen	94.999.808,00	5	70.837.098,00	100,00	74,57
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dipenuhi	5	Laporan	49.518.493.479,00	5	47.062.192.081,94	100,00	95,04
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	330	Orang/Bulan	49.518.493.479	330	47.062.192.081,94	100,00	95,04
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dikelola	7	Laporan	95.147.895,00	7	89.836.250,00	100,00	94,42

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	95.147.895,00	7	89.836.250,00	100,00	94,42
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.580.498.185,00	100	1.382.175.109,00	100,00	87,45
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29.992.717,00	2	29.431.000,00	200,00	98,13

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PMKP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket 18.132.864,00	1	18.132.200,00	100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PPP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket 10.000.000,00	1	10.000.000,00	100,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket 11.325.000,00	1	11.325.000,00	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket 4.998.835,00	1	4.998.000,00	100,00	99,98
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 143.250.262,00	2	142.139.125,00	200,00	99,22
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PMKP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 19.462.485,00	1	19.230.225,00	100,00	98,81
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PPP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 10.223.145,00	1	10.202.400,00	100,00	99,80

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 36.389.291,00	1	35.989.000,00	100,00	98,90
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket 24.998.315,00	2	24.188.000,00	200,00	96,76
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket 235.282.000,00	2	229.081.000,00	200,00	97,36
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket 10.000.000,00	1	9.840.000,00	100,00	98,40
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket 59.994.394,00	2	57.158.600,00	200,00	95,27

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PMKP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket 16.600.535,00	1	16.394.130,00	100,00	98,76
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PPP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket 9.999.983,00	1	7.724.150,00	100,00	77,24
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PSBTPH)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket 14.998.359,00	1	14.859.000,00	100,00	99,07
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan 924.850.000,00	1	741.483.279,00	100,00	80,17

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	1	Unit	221.863.200,00	-	219.627.200,00	-	98,99
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	221.863.200,00	-	219.627.200,00	-	98,99
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Laporan	6.976.219.671,00	4	6.560.387.314,00	40,00	94,04

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan 15.000.000,00	-	10.270.000,00	-	68,47
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan 1.344.535.680,00	1	1.150.484.519,00	100,00	85,57
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan 25.000.000,00	1	15.000.000,00	-	60,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan 34.996.243,00	1	34.780.000,00	100,00	99,38

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan 17.500.000,00	2	17.500.000,00	200,00	100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan 3.408.797.176,00	1	3.294.141.760,00	100,00	96,64
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PMKP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan 3.998.604,00	1	3.857.180,00	100,00	96,46
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PPP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan 342.259.669,00	1	315.536.064,00	100,00	92,19

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PSBTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan 1.444.204.330,00	1	1.378.898.495,00	100,00	95,48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PTPH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan 339.927.969,00	1	339.919.296,00	100,00	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	284	Unit 1.684.264.500,00	284	1.428.165.991,12	100,00	84,79
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	8	Unit 256.990.000,00	8	256.986.654,00	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	Unit	197.540.000,00	90	197.511.012,00	100,00	99,99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	54.560.000,00	2	43.058.608,00	100,00	78,92

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PMKP)								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PPP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	36.060.000,00	1	34.876.602,00	100,00	96,72
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PSBTPH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	89.810.000,00	1	80.893.154,00	14,29	90,07

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PTPH)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	36.060.000,00	1	33.938.646,00	16,67	94,12
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit	74.922.000,00	125	73.168.500,00	100,00	97,66
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PMKP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	9.840.000,00	15	9.790.000,00	100,00	99,49
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PPP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	Unit	19.920.000,00	38	19.920.000,00	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	6	Unit	908.562.500,00	6	678.022.815,12	100,00	74,63
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,64	Persen	44.650.897.923,00	1,02	35.284.251.625	38,64	79,02
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	9170	Ha	34.341.333.031,00	9.170	27.759.281.878,90	100,00	80,83

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	34.341.333.031,00	1	27.759.281.878,90	100,00	80,83
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Benih/Bibit Tanaman	9170	Ha	10.269.564.952,00	11.189	7.524.969.746,00	122,02	73,27
		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT PSBTPH)	Jumlah sertifikat	460	Sertifikat	232.441.966,00	308	226.777.000,00	66,96	97,56
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Holtikultura,	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	1	Laporan	9.109.585.005,00	1	6.622.629.896,00	100,00	72,70
							-	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Peredaran Benih/Bibit Hortikultura							
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Holtikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT PSBTPH)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1	Laporan	927.537.981,00	1	675.562.850,00	100,00	72,83
							-	-	-	-
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	6,81	Persen	12.518.157.140,00	1,17	9.534.859.657,77	17,18	76,17
		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Penataan Prasarana	1070	Ha	12.518.157.140,00	1.070	9.534.859.657,77	100,00	76,17

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pertanian						
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1	Dokumen 2.932.031.805,00	1	1.357.356.535,43	100,00	46,29
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1	Dokumen 5.175.173.335,00	1	4.064.008.869,34	100,00	78,53
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1	Unit 4.410.952.000	1	4.113.494.253,00	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(UPTP PSBTPH)								
		Program Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	6,81	Persen	927.851.569,00	1	856.411.986,00	17,18	92,30
		Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	2500	Ha	927.851.569,00	2.500	856.411.986,00	100,00	92,30
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2500	Ha	927.851.569,00	2.500	856.411.986,00	100,00	92,30

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			yang Dikendalikan							
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang Ditingkatkan Kompetensinya	3	Persen	1.611.992.141,00	3	1.286.768.750,00	100,00	79,82
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240	Orang	461.997.212,00	165	317.583.750,00	68,75	68,74
		Penyediaan dan peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang tersedia dan ditingkatkan kompetensinya	120	Orang	461.997.212,00	165	317.583.750,00	137,50	68,74

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Koorporasi Petani	2	Unit	149.995.000,00	2	109.463.700,00	100,00	72,98
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2	Unit	149.995.000,00	2	109.463.700,00	100,00	72,98
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Dibina dan Diawasi	24	Kelompok	999.999.929,00	24	828.446.300,00	100,00	82,84
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	24	Kelompok	999.999.929,00	24	828.446.300,00	100,00	82,84

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2024		REALISASI 2024		TINGKAT CAPAIAN (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		5	Laporan 39.999.940,00	5	31.275.000,00	100,00	78,19
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	5	Laporan 39.999.940,00	5	31.275.000,00	100,00	78,19

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas ptpH Provinsi Riau Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas PTPH Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari analisis 2(dua) sasaran strategis, dengan 5(lima) indikator kinerja utama diketahui bahwa terdapat 2 indikator sasaran strategis yang tercapai, 3 tidak tercapai.

4.2. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang

Secara administrasi pelaksanaan kegiatan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengikuti prognosis fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan sesuai dengan DPA yang telah disahkan

2. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan/item pekerjaan secara rutin
3. Peningkatan SDM melalui pelatihan

Untuk pencapaian kinerja strategis, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga;**

Strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, melakukan kerjasama dengan daerah tetangga untuk pemenuhan pokok pangan masyarakat, mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan, meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan penanggulangan kerawanan pangan, kuantitas, gizi dan mutu.

- 2. Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomioleh seluruh masyarakat (Distribusi) ;**

Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan dengan indikator keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan, keterjangkauan/ kesesuaian social/budaya, kesesuaian terhadap preferensi, kesesuaian terhadap kebiasaan & budaya, kesesuaian terhadap agama.

- 3. Meningkatkan Pemanfaatan dan Keamanan Pangan;**

Strategi pemanfaatan dan keamanan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dimana upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat .

4. Pembangunan Pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta Peningkatan luas panen dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan

Strategi diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas utama pertanian melalui peningkatan luas tanam (meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) untuk tanaman pangan, dengan melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produksi, serta pengadaan alat mesin pertanian untuk mendukung percepatan tanam

5. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan produktifitas dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan dan Penerapan Teknologi Septa Usaha Tani (penggunaan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, pasca panen dan

pemasaran hasil panen) , serta peningkatan prasarana pertanian dengan alsintan (alat pengolahan lahan, alat pasca panen dan alat pengolahan hasil)

6. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RAHMAN HADI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2024

**Pihak Kedua,
Pj. Gubernur Riau**

**Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura**

Dr. Rahman Hadi, M.Si

**Muhammad Job Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197505281994121001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70.12%
2	Meningkatnya produksi TPH	Jumlah Produksi Padi (Ton)	436,203
		Jumlah Produksi Jagung (Ton)	40,382
		Jumlah Produksi Buah-buahan (Durian) (Ton)	23,814
		Jumlah Produksi Sayuran (Cabe) (Ton)	22,419
3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (skor)	72.95

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	778,261,191.00	
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	645,549,655.00	
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	389,978,734.00	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	60,171,486,738.00	
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	44,650,897,923.00	
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12,518,157,140.00	
6.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	927,851,569.00	
7.	Program Penyuluhan Pertanian	1,611,992,141.00	
	TOTAL APBD	121,694,175,091.00	

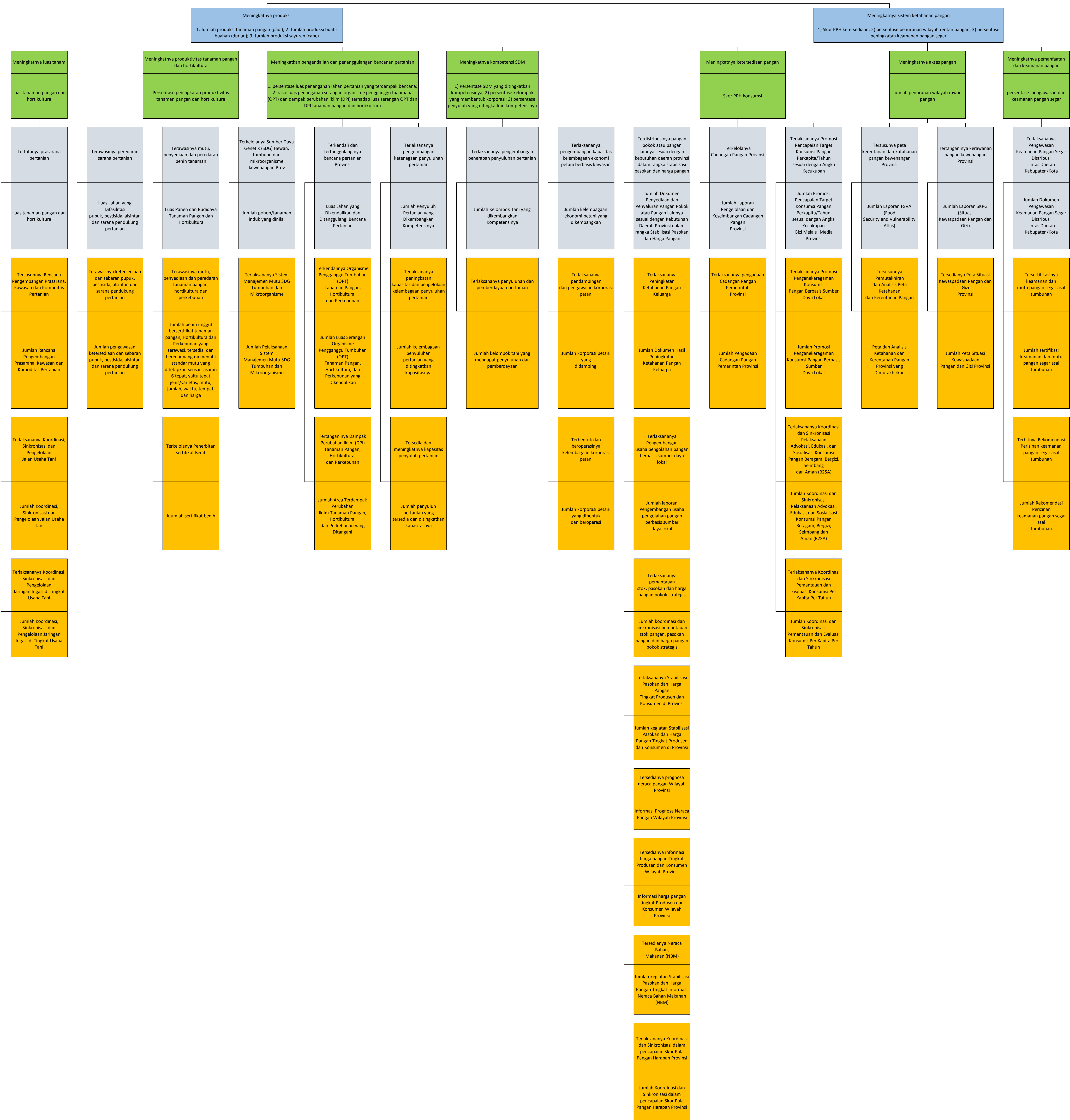
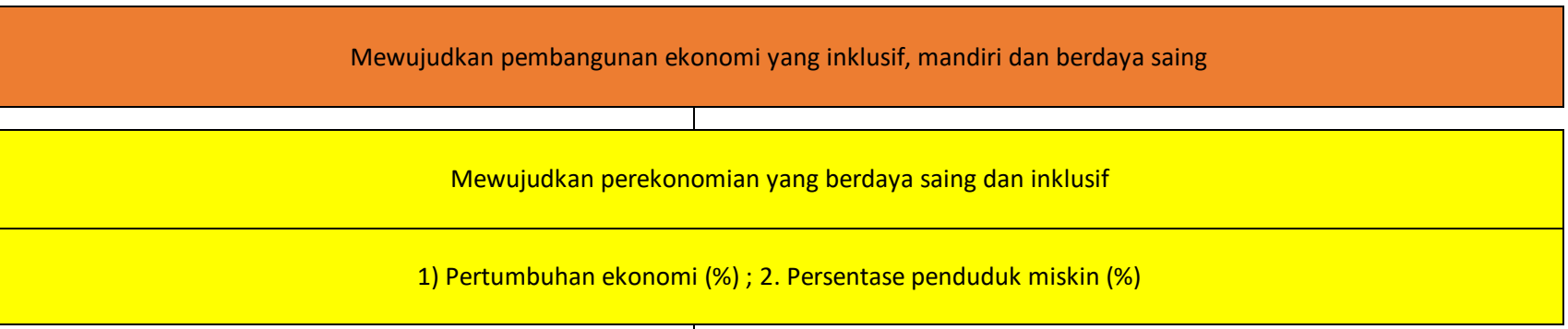
NO	UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)	75,000,000.00	
2.	Direktorat Jendral Tanaman Pangan (DK)	1,813,396,000.00	
3.	Direktorat Jendral Hortikultura (DK)	986,146,000.00	
4.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (DK)	3,533,632,000.00	
5.	Badan Pangan Nasional	3,132,687,000.00	
	TOTAL APBN (DEKONSENTRASI)	9,540,861,000.00	
1.	Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (TP)	37,668,435,000.00	
2.	Direktorat Jendral Tanaman Pangan (TP)	2,813,538,000.00	
3.	Direktorat Jendral Hortikultura (TP)	1,520,000,000.00	
	TOTAL APBN (TUGAS PEMBANTUAN)	42,001,973,000.00	
	TOTAL APBN	51,542,834,000.00	

Pj. GUBERNUR RIAU

Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Pekanbaru, November 2024
Plt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Provinsi Riau

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19750528 199412 1 001



Pekanbaru, 31 Januari 2025

PIL. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

MUHAMMAD JOE KURNIAWAN,AP..M.Si
NIP. 19750528 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JL. HR. SOEBRANTAS NO. 4 - PEKANBARU KODE POS : 28294
TELP. (0761) 7434974
E-mail : distanhor@riau.go.id Website : <http://distanhor.riau.go.id>

PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN
DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

No	Kab/ Kota	Padi			Jagung			Kedelai			Kacang Tanah		
		Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	KUANTAN SINGINGI	4.964,49	44,50	22.090,91	81,40	34,62	281,77	11,75	14,67	17,24	33,00	13,15	43,41
2	INDRAGIRI HULU	919,55	40,51	3.724,87	10,50	34,03	35,73	0,10	15,02	0,15	32,45	14,05	45,58
3	INDRAGIRI HILIR	15.940,99	36,60	58.342,77	436,10	44,35	1.934,17	9,00	14,78	13,30	1,40	12,99	1,22
4	PELALAWAN	7.690,02	39,33	30.242,58	203,10	19,28	391,55	1,00	14,20	1,42	17,00	10,47	17,80
5	SIAK	5.886,27	43,83	25.802,01	165,80	35,18	583,25	0,30	14,20	0,43	11,20	14,74	16,51
6	KAMPAR	2.189,29	42,10	9.216,87	1090,00	33,36	3.635,76	24,00	14,86	35,68	163,00	15,25	248,61
7	ROKAN HULU	1.225,50	42,03	5.150,72	274,50	37,57	1.031,28	21,00	14,39	30,22	86,80	10,93	94,85
8	BENGKALIS	3.580,61	37,96	13.591,88	69,80	33,99	237,25	-	-	-	3,90	12,79	4,99
9	ROKAN HILIR	8.169,71	46,09	37.656,36	123,86	32,67	404,67	79,40	14,84	117,87	6,80	12,97	8,82
10	KEPULAUAN MERANTI	2.927,10	33,92	9.927,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KOTA PEKANBARU	5,09	42,58	21,68	195,25	31,60	616,92	14,00	15,02	21,03	2,00	12,57	2,51
12	KOTA DUMAI	2.923,35	24,99	7.306,73	62,75	34,55	216,80	20,00	15,02	30,05	4,05	12,85	5,20
JUMLAH		56.421,96	39,54	223.075,20	2.713,06	34,53	9.369,14	180,55	14,81	267,38	361,60	13,55	490,10

No	Kab/ Kota	Ubi Kayu			Uji Jalar			Kacang Hijau			Total		
		Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	KUANTAN SINGINGI	113,60	328,09	3.727,07	2,50	204,00	51,00	-	-	-	5.206,74	50,34	26.211,41
2	INDRAGIRI HULU	124,75	450,45	5.619,34	16,35	221,47	362,10	-	-	-	1.103,70	88,68	9.787,76
3	INDRAGIRI HILIR	213,25	223,52	4.766,48	91,25	210,12	1.917,34	-	-	-	16.691,99	40,12	66.975,89
4	PELALAWAN	83,70	170,67	1.428,54	6,00	222,69	133,61	-	-	-	8.000,82	40,27	32.215,50
5	SIAK	82,80	282,40	2.338,29	7,10	256,55	182,15	-	-	-	6.153,47	47,00	28.922,64
6	KAMPAR	443,00	205,87	9.120,06	39,00	222,58	868,06	-	-	-	3.948,29	58,57	23.125,04
7	ROKAN HULU	187,55	264,38	4.958,52	76,00	212,71	1.616,57	-	-	-	1.871,35	68,84	12.882,15
8	BENGKALIS	362,69	305,04	11.063,51	18,99	210,21	399,20	-	-	-	4.035,99	62,68	25.296,82
9	ROKAN HILIR	120,78	291,55	3.521,36	13,79	224,33	309,35	-	-	-	8.514,34	49,35	42.018,42
10	KEPULAUAN MERANTI	74,00	215,76	1.596,63	-	-	-	-	-	-	3.001,10	38,40	11.524,45
11	KOTA PEKANBARU	101,22	321,02	3.249,40	2,49	205,35	51,13	-	-	-	320,05	123,81	3.962,67
12	KOTA DUMAI	112,30	265,97	2.986,88	-	-	-	-	-	-	3.122,45	33,77	10.545,66
JUMLAH		2.019,64	269,24	54.376,08	273,47	215,40	5.890,51	-	-	-	61.970,23	47,36	293.468,40

Catatan : Data di atas masih angka sementara (olahan dinas)

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Pit. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU



MUHAMMAD JOB KURNIAWAN, AP., M.Si

Pembina Utama Madya (IV.d)

NIP. 19750528 199412 1 001